

SOSIOLOGI HUKUM

Roger Cotterrell



PERPUSTAKAAN

No. INV.	154/mhk/19/C-1	
Th. Angg.	2019	Cat C-1
PARAP	gm	TGL 17/07/2019



NUSAMEDIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	XII
PENDAHULUAN: TEORI DAN METODE DALAM STUDI	
HUKUM	1
Konsepsi Hukum dari Praktisi-hukum	3
Macam Perspektif Hukum	4
Sosiologi dan Hukum	6
Penggolongan dan Bahayanya	9
Positivisme Hukum	11
Beberapa Keterbatasan Positivisme Hukum	13
<i>Positivisme Sosiologis versus 'Sosiologi Interpretatif'</i>	14
<i>Objectivitas dan Nilai-nilai</i>	18
Catatan Akhir	21
1. DASAR SOSIAL HUKUM	22
Budaya Tradisional (<i>Folkways</i>) dan Adat-istiadat (<i>Mores</i>)	25
Hukum dan Budaya	29
<i>Savigny</i>	29
<i>Gagasan-gagasan Hukum dan 'Pemahaman Bersama'</i>	32
Polemik Ehrlich mengenai Positivisme Hukum	36
Hukum sebagai Kerangka Kehidupan Sosial	40
Studi Empiris mengenai 'Living Law'	45
Hanya Polemik Belaka?	49
Masalah Konsep Hukum	54
<i>Pluralisme hukum</i>	56
<i>Hukum sebagai Peraturan Koersif</i>	57
<i>Pemrosesan Perkara</i>	58
<i>Hukum sebagai Doktrin</i>	59
Catatan Akhir	62

2. HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PERUBAHAN SOSIAL	63
Hukum Modern dan Negara Modern	64
Perubahan Sosial	67
<i>Dampak Perubahan Sosial pada Hukum</i>	70
Batasan Tindakan Hukum yang Efektif	72
Membuat Orang Menjadi Baik dengan Hukum?	75
Strategi Legislatif untuk Mendorong Perubahan Sosial	80
Beberapa Prasyarat untuk Legislasi yang Efektif	84
Keterbatasan Studi Hukum dan Perubahan Sosial'	90
Catatan Akhir	96
 3. HUKUM SEBAGAI SEBUAH MEKANISME INTEGRATIF	 97
Fungsi dan Tujuan Hukum	98
Konsepsi Kohesi Sosial Terpusat-hukum: Pound	101
Hukum dan Solidaritas dalam Masyarakat Modern: Durkheim	105
Fungsi Universal Hukum?: Llewellyn	110
Sistem Sosial dan Struktur Sosial: Parsons	113
<i>Persyaratan Fungsional Sistem Sosial</i>	113
<i>Struktur Normatif</i>	114
Otonomi Hukum dalam Masyarakat Barat	116
Profesi Hukum dan Fungsinya	120
Sistem Hukum sebagai sebuah Sub-sistem dari Masyarakat	123
Hukum dan Kesempatan yang Setara: Sebuah Uji Empiris terhadap	Teori Parsonian.
	126
Fungsionalisme sebagai Teori Sosial	129
Fungsi-fungsi Integratif Hukum	132
Catatan Akhir	136
 4. HUKUM, KEKUASAAN DAN IDEOLOGI	 137
Konstituensi Konsensus	138
Fungsi-fungsi Simbolik Hukum	142
Marx: Fungsi Represif dan Fungsi Ideologis Hukum	148
Hukum, Kelas, dan Kekuasaan	153
Hukum dan Ideologi	159
Individualisme hukum	164
Hukum dalam Masyarakat Korporat	171
<i>Berbagai Person Hukum</i>	171

<i>Individualisme dan Korporasi</i>	173
<i>Hukum, Negara dan Kekuasaan Ekonomi Korporat</i>	175
Negara dan Individu	180
Masalah Determinisme Ekonomi	184
Catatan Akhir	189

5. PENERIMAAN DAN LEGITIMASI HUKUM191

Pengalaman Hukum: Pendekatan Positivis dan Studi-studi KOL 192	
Sosialisasi Hukum	197
Mencegah-pelanggaran dan Kepatuhan terhadap Hukum	199
Pendekatan Mikrososiologis: Fenomenologi dan Etnometodologi 202	
Penerimaan Instrumental terhadap Hukum: Max Weber	206
Metode Analisis Tindakan Sosialisasi	207
<i>Hukum sebagai Kerangka Tindakan Sosial</i>	210
Legalitas dan Legitimasi	212
<i>Tipe Pemikiran Hukum</i>	213
<i>Dominasi Hukum</i>	215
Makna Peraturan Hukum	219
Transformasi Hukum Modern: Regulasi yang Diskresioner, Mekanis dan Mengistimewakan	224
<i>Regulasi Diskresioner</i>	225
<i>Regulasi Mekanis</i>	228
<i>Regulasi yang Mengistimewakan</i>	229
Penjelasan Sosiologis terhadap Perubahan Bentuk Hukum Barat 231	
Legitimasi Hukum Sesudah Peraturan Hukum?	233
Ideologi, Nilai-nilai Personal dan Dukungan terhadap Hukum 235	
<i>Apakah Penerimaan Tergantung pada Ketidaktahuan?</i>	237
<i>Interpretasi terhadap Pengalaman Hukum</i>	239
<i>Pengalaman Hukum di Negara Sejahtera</i>	242
Catatan Akhir	244

6. PERWAKILAN HUKUM PROFESIONAL245

Hakikat Profesi Hukum	247
Himpunan Profesional dan Stratifikasi Pekerjaan Hukum	253
Nilai-nilai Resmi Praktik Hukum	257
Kepentingan Klien dan Kepentingan Publik	262
Pengetahuan Profesional	266

<i>Pengetahuan Profesional dan Perubahan Bentuk Hukum Barat</i>	269
Pengaruh Praktiksi Hukum terhadap Hukum	274
<i>Konservatisme Praktisi Hukum</i>	274
<i>Individualisme dan Independensi</i>	276
<i>Praktisi Hukum dan Ideologi Hukum</i>	278
Catatan Akhir	280

7. HAKIM, PENGADILAN, SENGKETA 281

Konsep tentang Hakim dan Pengadilan	283
Pengadilan dan Sengketa	288
<i>Apakah Pengadilan itu Sangat Tepat untuk Resolusi Sengketa?</i>	289
<i>Apakah Sengketa Sentral bagi Kerja Pengadilan?</i>	291
<i>Resolusi Sengketa Tak Langsung</i>	294
Perilaku Yudisial dan Studi tentang Organisasi Pengadilan Tinggi	
297	
<i>Pengadilan Banding, Pengadilan Tingkat Pertama dan Realisme Hukum</i>	297
<i>Behavioralisme Yudisial</i>	300
<i>Organisasi dan Pandangan Yudisial</i>	302
Fenomenologi, Etnometodologi dan Studi-studi tentang Interaksi dan Organisasi di Pengadilan Rendah	305
<i>Fungsi-fungsi Ideologis Pengadilan</i>	309
<i>Pembentukan Hukum dan Penemuan Hukum</i>	311
<i>Pengadilan dan Konstitusi</i>	312
<i>Variasi dalam Dasar-dasar Otoritas Kehakiman</i>	314
<i>Politisasi Persidangan</i>	317
Hakim dan Negara	319
Hirarki Yudisial sebagai Sistem Administratif	324
<i>Banding dan Sentralisasi Yudisial</i>	324
<i>Banding dan Legitimasi Hukum</i>	326
<i>Disensi dan Pertimbangan Ganda</i>	328
Pengadilan sebagai Pembuat Kebijakan	329
Catatan Tambahan untuk Analisis Fungsional terhadap Pengadilan	
334	
Catatan Akhir	335

8. PENYELENGGARAAN DAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 337

<i>Komitmen Intitusional terhadap Doktrin Hukum</i>	338
<i>Penyelenggaraan Hukum dan Permohonan Bantuan Hukum</i> ...	340
<i>Kesempatan dan Insentif Permohonan Bantuan Hukum</i>	344

<i>Faktor-faktor yang Menghalangi Penyampaian Keluhan yang Efektif</i>	345
<i>Mencari Bantuan Hukum</i>	349
<i>Permohonan Bantuan Hukum dalam Mendukung Kepentingan Kolektif</i>	352
<i>Tipe Agensi Penyelenggaraan</i>	354
<i>Agensi-agensi Regulatoris dan Strategi-strateginya</i>	357
<i>Penggunaan Penuntutan dan Publisitas</i>	358
<i>Diskresi dalam Penyelenggaraan Hukum</i>	361
<i>Agensi-agensi Regulatoris dan Lingkungannya</i>	363
<i>Hubungan dengan Komunitas yang Diatur</i>	365
<i>Alasan-alasan bagi Kebijakan Akomodasi</i>	368
<i>Regulasi dan Kejahatan yang Sesungguhnya</i>	371
<i>Polisi dan Hukum</i>	375
<i>Penyelenggaraan Hukum</i>	376
<i>Diskresi Polisi</i>	377
<i>Tekanan Terhadap Legalitas dan Ilegalitas</i>	380
<i>Kerja dan Organisasi Polisi</i>	383
<i>Budaya Polisi</i>	387
<i>Penyelenggaraan dan Hukum</i>	392
<i>Catatan Akhir</i>	393
9. PROGNOSIS HUKUM	394
<i>Ruang Lingkup Hukum dan Otoritas Hukum</i>	397
<i>Informalisme, Delegalisasi dan Akses Hukum</i>	401
<i>Negara, Masyarakat Sipil, Difusi Kekuasaan dan Kontrol</i>	406
<i>Hancurnya Otonomi Hukum?</i>	412
<i>Masa Depan Individualisme Hukum</i>	417
<i>Demokratisasi Hukum</i>	420
<i>Apakah Informalisme itu Demokratisasi?</i>	422
<i>Apakah De-profesionalisasi itu Demokratisasi?</i>	422
<i>Apakah Partisipasi itu Demokratisasi?</i>	424
<i>Apakah Ketersediaan Pengetahuan itu Demokratisasi?</i>	427
<i>Catatan Akhir</i>	430
CATATAN DAN BACAAN LEBIH LANJUT	431
DAFTAR PUSTAKA	478
INDEKS	506